



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

**UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULFIKAR
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 753047

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.072.030.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/24 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 32 m2/32 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 29 m2/29 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 382 m2/60 m2 di KAB / KOTA BOGOR, Rp. 1.972.030.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 193.000.000

1. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. 50.919.587

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 470.656.008

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	5.786.605.595
III. HUTANG	Rp.	80.595.296
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.706.010.299

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.